



► PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan PBB 2022 Ditarget Rp97 Miliar

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mulai mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) untuk tahun pajak 2022 kepada 95.660 wajib pajak. Pemberitahuan ini sebagai upaya optimalisasi penerimaan salah satu pajak daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Jogja, Aman Yuriadijaya mengatakan pemberitahuan surat di awal tahun untuk mendorong wajib pajak segera memenuhi kewajiban mereka. Sehingga tidak perlu menunggu hingga mendekati

jatuh tempo.

Aman mengatakan wajib pajak PBB di Kota Jogja masih memiliki kebiasaan untuk melakukan pembayaran mendekati tanggal jatuh tempo atau menjelang 30 September. "Padahal untuk bisa menjalankan berbagai program pembangunan dibutuhkan dana. Kebutuhan ini ditopang oleh penerimaan asli daerah yaitu pajak," kata Aman, Rabu (19/1).

Dalam skema pajak, PBB memiliki porsi yang cukup besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini salah satunya karena pajak PBB tidak mengalami penurunan meskipun di masa pandemi. Nantinya penerimaan dana pajak dalam jumlah cukup akan membantu pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan. "Oleh karenanya kami berharap agar wajib pajak bisa segera memenuhi kewajiban mereka membayar PBB," kata Aman.

Untuk 2022, Pemkot Jogja menargetkan pendapatan dari PBB sebesar Rp97 miliar.

Sementara tahun lalu target penerimaan

PBB ditetapkan Rp92,5 miliar. Adapun realisasi 2021 sebesar Rp97,7 miliar atau 105,6 persen. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa, pencapaian realisasi 2021 didorong oleh program penghapusan denda yang ditetapkan Pemkot Jogja.

Penghapusan Denda

"Dari program penghapusan denda untuk PBB dari tahun pajak 1994 hingga 2021, ada penerimaan sekitar Rp10 miliar. Ini sangat membantu capaian pada tahun lalu," kata Wasesa.

Distribusi SPPT PBB 2022 dilakukan melalui kelurahan dan diharapkan sudah dapat diterima oleh semua wajib pajak pada 31 Maret. Pembayaran PBB bisa dilakukan melalui sejumlah bank seperti, BPD DIY, BNI, dan Bank Jogja. Bisa juga dilakukan melalui Pos Indonesia serta aplikasi uang elektronik *Gopay*, *Link Aja*, dan *Tokopedia*. Beberapa gerai pembayaran akan dibuka di titik-titik strategis untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban mereka. (Sirojul Khafla)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005